

Kesehatan, Pendidikan Hingga Insentif Dokter Prioritas Utama Perubahan APBD Mamuju 2026

Tayang: Kamis, 1 Oktober 2026

Penulis: [Baiq Sukma Widiawati](#) | Editor: [Ilham Mulyawan](#)



APBD Perubahan DISAHKAN - Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana dan Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin hatta bersalaman usai rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menggelar rapat paripurna terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026)

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten [Mamuju](#) H Syamsuddin Hatta menegaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 tidak dilakukan pemangkasan anggaran.

Menurutnya, perubahan APBD dilakukan melalui penambahan dan pergeseran anggaran untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan yang dinilai menjadi prioritas masyarakat.

"Kalau anggaran memang mengalami pergeseran sendiri, tidak ada pemangkasan. Yang ada adalah pergeseran," kata Syamsuddin Hatta saat ditemui usai rapat paripurna di gedung [DPRD Mamuju](#), Rabu (30/9/2026).

Gedung [DPRD Mamuju](#) berada di Jalan Yos Sudarso, berjarak sekitar 150 meter dari Perpustakaan Daerah [Mamuju](#). Kedua bangunan tersebut berada di ruas jalan yang sama dan hanya dipisahkan pagar. Sementara dari Rumah Sakit Pungawa Malolo, Gedung [DPRD Mamuju](#) berjarak sekitar 200 meter, tepat di seberang Jalan Ahmad Yani.

Syamsuddin menjelaskan, pembahasan perubahan APBD mencakup seluruh catatan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi yang ada di [DPRD Mamuju](#).

Menurutnya, setiap kebutuhan yang dinilai mendasar bagi masyarakat tetap dibahas dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Ia menyebut terdapat tiga sektor yang menjadi kebutuhan wajib dan mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan APBD 2026.

Ketiganya yakni sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Syamsuddin mengatakan, pergeseran anggaran dalam perubahan APBD tidak dilakukan begitu saja. Setiap pergeseran harus melalui pertimbangan dan kajian sebelum ditetapkan.

Ia menyebut pembahasan dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut Syamsuddin, pergeseran anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan yang menjadi prioritas.

Selain kebutuhan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, Syamsuddin menyebut terdapat tambahan anggaran untuk sejumlah kebutuhan lainnya.

Di antaranya keberlanjutan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta insentif dokter.

Syamsuddin mengatakan, [DPRD Mamuju](#) bersama pemerintah daerah sebelumnya terus menyuarakan kebutuhan tersebut kepada pemerintah pusat. Ia menyebut kebutuhan tersebut kini telah terakomodasi dalam perubahan APBD [Mamuju](#) 2026. (*)

Laporan wartawan tribun-sulbar.com Baiq Sukma Widiawati

Sumber: [Tribun Sulbar](#)